

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone berdasarkan atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone mencakup 3 (tiga) pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya masing-masing secara terus-menerus untuk preventif dan represif.
2. Pengawasan Fungsional dengan cara menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HaWasBid) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: W20-A2/SK/046a/PS.00.05/IX/2017 tanggal 19 September 2017, yang meliputi berbagai bidang, antara lain:

Tabel 4.1
Daftar Hakim Pengawas Bidang

No.	Nama	Gol	Kedudukan	
			Dalam Dinas	Dalam Pengawasan
1.	Drs. H. Pandi, S.H., M.H.	IV/d	Ketua	Pembina/ Pengarah
2.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	IV/d	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
3.	Drs. H. Ramly Kamil, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan

4.	Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Pelayanan Publik
5.	Drs. Makmur, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Kepaniteraan Gugatan, Permohonan dan Pengawasan PosBaKum
6.	Drs. Adaming, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Minutasi
7.	Drs. H. Abd. Samad	IV/d	Hakim	Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum
8	Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Keuangan Perkara dan PNPB
9.	Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Tata Ruang, Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Drs. Tayeb, S.H., M.H.	IV/b	Hakim	Bidang Administrasi Keuangan APBN, Belanja Barang dan Belanja Modal
11.	Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Umum dan Perlengkapan
12.	Dra. Siarah, M.H.	IV/b	Hakim	Bidang Administrasi Kepegawaian
13.	Jamaluddin, S.Ag.,SE., M.H.	III/d	Hakim	Bidang Perencanaan dan TI
14.	Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Kedisiplinan dan Lingkungan
15.	Drs. Muh. Kasyim, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Organisasi, Tata Laksana dan Pelaporan
16.	Dra. Hj. Husniwati	IV/c	Hakim	Bidang Pengawasan/ Pembinaan Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti

3. Pengawasan teknis Yustisial bagi hakim dilakukan secara rutin melalui:

- a. Eksaminasi Putusan
- b. LKH (Laporan Kegiatan Hakim)

B. Evaluasi

Untuk memastikan jalannya program kerja sesuai dengan perencanaan, maka dilakukan evaluasi terhadap kinerja atau produktivitas kerja yang

berhubungan dengan tupoksi masing-masing. Dengan mengadakan evaluasi, maka Pengadilan Agama Watampone dapat menilai sejauh mana keberhasilan dari program yang telah direncanakan selama tahun 2017.

Bentuk evaluasi yang dilakukan antara lain dengan melakukan rapat evaluasi menyeluruh setiap bulan. Adapun hasil evaluasi yang harus selalu menjadi perhatian adalah :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Penggunaan aplikasi SIPP bagi Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, Kasir dan user SIPP lainnya;
- Kebersihan dan kerapian lingkungan kerja & kantor ;
- Kedisiplinan dalam kehadiran di kantor ;
- Ketepatan, kecermatan dan ketelitian dalam membuat laporan.
- Segala hal yang menyangkut persiapan menghadapi Sertifikas Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), baik mengenai kelengkapan dokumen maupun optimalisasi sarana dan prasarana.